

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam melaksanakan pekerjaannya, sesuatu kantor ataupun lembaga penguasa amat membutuhkan pangkal energi orang yang senantiasa berfungsi aktif serta sering kali berkuasa dalam bermacam aktivitas. Perihal itu akrab kaitannya dengan keahlian orang bagaikan perencana, pelakon dari determinan terwujudnya sesuatu tujuan.

Akibat dari eksploitasi pangkal energi orang itu, lembaga penguasa bertanggung jawab buat membagikan menanggapi pelayanan yang dijadikan bagaikan bagian bayaran pekerja, bayaran pekerja itu terdiri dari pendapatan utama serta bermacam bantuan ialah aspek bayaran berarti dalam industri yang butuh diukur, dikendalikan serta dianalisis dengan cara lalu menembus.

Pendapatan ialah bagian dari kompensasi- kompensasi yang sangat besar yang diserahkan suatu lembaga bagaikan menanggapi pelayanan pada karyawannya, serta untuk karyawan ini ialah angka hak dari hasil mereka, pula bagaikan pangkal dorongan dalam bertugas. Dengan membagikan menanggapi pelayanan pada karyawan, itu bisa membagikan khasiat untuk industri buat menarik pekerja yang memiliki keahlian kedalam badan serta mendesak pekerja supaya membuktikan hasil yang baik, dan menjaga hasil pekerja sepanjang rentang waktu yang jauh.

Disamping itu cara penatausahaan pembayaran pendapatan pula dipakai buat menghindari terbentuknya ketakjujuran serta kecurangan dalam lembaga itu. Perihal itu bisa pula terjalin pada bagian finansial dalam wujud pengeluaran duit kantor semacam pembayaran pendapatan, imbalan daya kegiatan ataupun menanggapi pelayanan dari daya serta benak yang disumbangkan pada industri dalam waktu durasi khusus.

Salah satu pandangan berarti dari pergantian bentuk perhitungan Negeri merupakan diharuskan Penguasa (Pusat serta Wilayah) buat menata perhitungan (APBN serta APBD) dengan pendekatan kemampuan yang bisa dijamin jawabkan dengan cara tembus pandang serta akuntabel. Maksudnya, tiap anggaran yang dialokasikan dalam APBD wajib bisa berhubungan dengan jasa yang diserahkan pada warga ataupun dengan hasil yang diharapkan bisa dicapai.

Dibidang peliputan, cocok mandat Artikel 31 Hukum Nomor. 17 tahun 2003 serta artikel 184 Hukum Nomor. 23 tahun 2004, Kepala Wilayah, bagus Gubernur, Bupati, ataupun Walikota wajib mengantarkan Informasi Finansial Wilayah yang sudah ditilik oleh BPK, pada DPRD paling lambat 6 bulan sehabis tahun perhitungan selesai. Informasi Finansial itu mencakup Informasi Realisasi APBD(LRA).

Tidak hanya itu, keharusan Penguasa Wilayah buat menata peraturan penerapan pengurusan finansial wilayah jadi halangan ataupun permasalahan tertentu. Minimnya SDM yang kerangka balik akutansi menimbulkan Perda serta peraturan

Kepala Wilayah hal Pengurusan Finansial Wilayah cuma hanya copy paste ataupun menkopi dari ketentuan- ketentuan yang telah tersebar ataupun dari penguasa wilayah.

Tidak hanya kasus diatas, dalam pencatatan system akutansi sepatutnya dicermati segi- segi akutansi yang legal biasa, ialah: rancangan dasar akutansi finansial, rancangan dasar akutansi penguasa, standar akutansi rezim, prinsip dasar akutansi, kebijaksanaan akutansi, sitem akutansi, denah benak standar, harian standar posting rules, karakter kualitatif informasi finansial (relevan, reliable, complete, comparable), dan dilengkapi dengan uraian pokok serta global mengenai konsepsi finansial Negeri serta aturan mengurus finansial Negeri ataupun Wilayah, dan subtansi pembaruan aturan mengurus finansial Negara.

Berdasarkan hal diatas, penulis mencoba mempelajari tentang Proses Pengeluaran Gaji dan Tunjangan, Penulis memilih “Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat” sebagai tempat pelaksanaan magang yaitu tepatnya di bagian keuangan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat yang mengangkat judul “Proses Penatausahaan Pengeluaran Gaji Dan Tunjangan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat”

1.2 Perumusan Masalah

Bersumber pada kepala karangan diatas pengarang mau mangulas permasalahan mengenai cara penatausahaan pengeluaran pendapatan serta bantuan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat yaitu bagaimana “Proses Penatausahaan Pengeluaran Gaji dan Tunjangan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat”

1.3 Tujuan Magang

Magang ialah sesuatu mata kuliah harus yang dicoba oleh semua mahasiswa Program Akta III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, Adapun tujuan yang akan dicapai dalam praktek kegiatan atau magang ini merupakan bagaikan selanjutnya buat mengenali :

- a. menguasai cara penatausahaan pengeluaran pendapatan serta bantuan Badan Penjaminan Kualitas Pembelajaran(LPMP) Provinsi Sumatera Barat.
- b. untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam proses penatausahaan pengeluaran gaji dan tunjangan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

Aktivitas magang ialah sesuatu cara buat menekuni praktek- praktek profesi yang jelas pada lembaga rezim, alhasil bisa membagikan khasiat untuk partisipan magang sendiri. Ada pula khasiat yang bisa didapat dari aktivitas magang ini merupakan:

1. Bagi Penulis

- a. menaikkan ilmu wawasan serta pengetahuan hal Cara Penatausahaan Pengeluaran Pendapatan serta Bantuan Badan Penjaminan Kualitas Pembelajaran(LPMP) Provinsi Sumatera Barat.
- b. mengenali permasalahan serta halangan dalam Cara Penatausahaan Pengeluaran Pendapatan serta Bantuan.
- c. buat memperoleh pengalaman serta uraian hal bumi kegiatan yang sebetulnya.
- d. membuat karakter yang bertanggung jawab serta kuat yang diperlukan buat merambah bumi kerja.

2. Bagi Perusahaan

- a. Bisa membagikan khasiat untuk lembaga penguasa ialah Badan Penjaminan Kualitas Pembelajaran(LPMP) Provinsi Sumatera Barat dalam Cara Penerapan Kemampuan Cocok dengan metode yang legal.
- b. Bisa menolong lembaga penguasa buat menuntaskan tugasnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahamn, maka sistematika dalam penulisan laporan ini disusun dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I Merupakan Kata pengantar. Dalam ayat ini dijabarkan mengenai dasar penyusunan kepala karangan, tujuan magang dengan cara biasa serta dengan cara spesial, khasiat magang, serta penataan penyusunan.

BAB II Merupakan kerangka filosofi. Dalam ayat ini menarangkan mengenai pengurusan Finansial Wilayah serta penafsiran Cara Penatausahaan Pengeluaran.

BAB III Merupakan cerminan biasa. Dalam ayat ini bermuatan mengenai penjelasan cerminan biasa tempat magang ialah Badan Penjaminan Kualitas Pembelajaran(LPMP) Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV Menarangkan mengenai Cara Penatausahaan Pengeluaran Pendapatan serta Bantuan, serta menarangkan mengenai prinsip pemakaian Account Pemasukan Berbelanja Karyawan, Berbelanja Benda, Berbelanja Modal serta Informasi dalam Sistem Akutansi Lembaga.

BAB V Merupakan kesimpulan serta anjuran. Dalam ayat ini ialah penutup yang mengemukakan sebagian kesimpulan serta anjuran dari hasil ulasan ayat tadinya.

